

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMATAN SELATAN

Management of Facilities and Infrastructure at the Community and Village Empowerment Agency of Banjar Regency, South Kalimantan Province

Jumarianta

Fakultas Ilmu Administrasi
Univewrsitas Achmad Yani
Banjarmasin

*email:

jumarianto2024@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pada indikator perencanaan kebutuhan dan penganggaran, proses perencanaan dilakukan melalui pengajuan kebutuhan dari masing-masing bidang dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan anggaran sehingga tidak seluruh kebutuhan dapat direalisasikan secara optimal. Pada indikator pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan berdasarkan kebutuhan kerja dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana dan proses pengadaan yang memerlukan waktu. Pada indikator pemanfaatan, sarana dan prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai. Namun, pemanfaatannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas dan adanya sarana yang memerlukan perbaikan. Pada indikator pengamanan dan pemeliharaan, kegiatan pengamanan dan pemeliharaan telah dilakukan melalui pendataan, pengawasan, pengecekan, dan perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan ringan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang memerlukan pemeliharaan lebih lanjut. Pada indikator pemindahtanganan, barang yang sudah rusak berat atau tidak lagi digunakan telah dilakukan proses pendataan dan pengusulan untuk dipindahtanganan melalui lelang maupun hibah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala administratif sehingga proses pemindahtanganan memerlukan waktu yang cukup lama.

Kata Kunci:

Pengelolaan,
Sarana
Prasarana

Keywords:

Management
Facilities
Infrastructure

Abstract

This study aims to examine the management of facilities and infrastructure at the Community and Village Empowerment Agency of Banjar Regency, South Kalimantan Province. It employs a qualitative approach with a descriptive research design, utilizing data collection methods such as literature review, observation, and interviews. Regarding the needs planning and budgeting indicator, the planning process involves submitting requirements from each division, which are then adjusted to the available budget capacity; however, budget constraints prevent the optimal fulfillment of all needs. Concerning procurement, the acquisition of facilities and infrastructure is based on operational requirements and applicable procedures to support administrative and office activities, though implementation faces obstacles such as limited funds and time-consuming procurement processes. In terms of utilization, available facilities and infrastructure support employee tasks, yet usage is not fully optimized due to facility limitations and the need for repairs on certain items. Regarding security and maintenance, activities include inventorying, monitoring, inspecting, and repairing minor damage to ensure facilities remain functional, although some assets still require further maintenance. Finally, regarding the transfer of assets, items that are severely damaged or no longer in use undergo inventorying and are proposed for transfer—via auction or grant—in accordance with applicable procedures; however, administrative hurdles often result in a lengthy transfer process.

Submit Tgl.: 16-Juli-2026

Diterima Tgl.: 18-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 20-Juli-2026

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ketersediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya terbatas pada penyediaan barang, tetapi meliputi serangkaian proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, hingga pemindah tanganan barang milik daerah. Proses tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan demikian, setiap tahapan pengelolaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar sebagai salah satu organisasi perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dinas ini sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan studi pendahuluan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Pada aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan perencanaan yang diajukan serta belum sepenuhnya berbasis skala prioritas. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi secara optimal.

Pada aspek pengadaan, masih terdapat kendala berupa keterlambatan dalam proses pengadaan serta prosedur administrasi yang cukup kompleks. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa spesifikasi barang yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga pemanfaatannya menjadi kurang maksimal.

Pada aspek pemanfaatan, masih ditemukan bahwa beberapa sarana dan prasarana belum digunakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya barang yang jarang digunakan atau pemanfaatannya belum sesuai dengan fungsi yang seharusnya, sehingga belum memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung kinerja organisasi.

Pada aspek pengamanan dan pemeliharaan, permasalahan yang muncul antara lain belum tertibnya pencatatan inventaris barang, kurangnya pemeliharaan rutin, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan beberapa sarana dan prasarana mengalami kerusakan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sementara itu, pada aspek pemindah tanganan, seperti penghapusan barang milik daerah, masih ditemukan adanya keterlambatan dalam proses administrasi. Akibatnya, barang yang sudah tidak layak pakai masih tercatat sebagai aset dan menyebabkan penumpukan barang yang tidak produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai proses

pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pemindahtanganan. Seluruh proses tersebut dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka, observasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui tahapan reduksi data, medisplay atau menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan dan penganggaran

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan untuk menentukan kebutuhan fasilitas yang diperlukan serta menyesuaikannya dengan anggaran yang tersedia agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susilawati S.ST selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, menyampaikan bahwa:

“Perencanaan kebutuhan dan penganggaran sarana dan prasarana dilakukan melalui pengajuan usulan dari masing-masing bidang sesuai kebutuhan kerja. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia serta diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan yang dianggap penting. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala sehingga tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan secara optimal”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu GT Nadya Noor Safitri SE, AK, MM selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, menyampaikan bahwa:

“Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan operasional pegawai. Kebutuhan yang diajukan disesuaikan dengan kondisi fasilitas yang tersedia di lingkungan kerja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum dapat dipenuhi karena harus menyesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah dilakukan melalui proses pengajuan kebutuhan, penentuan skala prioritas, serta penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan adanya kebutuhan mendesak sehingga perencanaan kebutuhan dan penganggaran sarana dan prasarana belum sepenuhnya berjalan optimal.

2. Pengadaan

Dalam hal pengadaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kerja serta mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu GT Nadya Noor Safitri, SE, Ak, MM selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, menyampaikan sebagai berikut:

“Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pengadaan dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan operasional pegawai, namun tidak semua kebutuhan dapat langsung dipenuhi karena adanya keterbatasan anggaran serta proses pengadaan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Daud Yahya, SE, selaku Staf Perencanaan, menyampaikan:

“Proses pengadaan dilakukan melalui tahap pengusulan kebutuhan dari setiap bidang, kemudian dilakukan penyesuaian dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan dana serta lamanya proses pengadaan sehingga beberapa kebutuhan belum dapat direalisasikan dengan cepat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana merupakan proses pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja yang dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan proses pengadaan yang memerlukan waktu, sehingga pengadaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya berjalan optimal.

3. Pemanfaatan.

Pemanfaatan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah proses penggunaan atau pendayagunaan seluruh sarana dan prasarana secara efektif dan efisien guna menunjang pelaksanaan kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pemanfaatan yang baik, sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam mendukung aktivitas kerja pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahma Nor Mila, A,Md selaku staf pengelola sarana dan prasarana, beliau menyampaikan bahwa:

“Pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dan digunakan untuk menunjang kelancaran pekerjaan pegawai. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya, seperti adanya sarana yang mengalami kerusakan ringan serta keterbatasan fasilitas tertentu sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bergantian”.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Noor Efendi selaku staf administrasi perkantoran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian, pada saat wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang tersedia cukup membantu dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi sehari-hari. Namun, beberapa fasilitas dinilai masih perlu ditingkatkan agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah dilakukan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional pegawai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada umumnya telah digunakan sesuai dengan kebutuhan kerja masing-masing bidang. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas, kondisi sarana yang memerlukan perbaikan, serta penggunaan fasilitas yang belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, pemanfaatan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

4. Pengamanan dan pemeliharaan.

Pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana agar fasilitas yang dimiliki tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal. Dengan adanya pengamanan dan pemeliharaan yang baik, sarana dan prasarana dapat memiliki masa pakai yang lebih lama serta mampu menunjang efektivitas kerja pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahma Nor Mila, A.Md selaku staf pengelola sarana dan prasarana, beliau menyampaikan bahwa:

“Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan membersihkan, mengecek, dan memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan ringan agar tetap dapat digunakan. Ia juga

menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan dengan mendata serta mengontrol penggunaan barang agar sarana dan prasarana tetap terjaga kondisinya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran pemeliharaan dan adanya sarana yang memerlukan perbaikan lebih lanjut sehingga belum dapat ditangani secara maksimal”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap baik dan dapat digunakan dalam mendukung kegiatan kerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran dan adanya sarana yang memerlukan perbaikan, sehingga pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya optimal.

5. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan salah satu bagian dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan terhadap barang atau fasilitas yang sudah tidak digunakan lagi. Pemindahtanganan sarana dan prasarana adalah kegiatan pengalihan barang atau fasilitas yang sudah tidak digunakan lagi kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemindahtanganan dilakukan agar barang yang sudah tidak layak atau tidak diperlukan lagi dapat dikelola dengan baik serta tidak menumpuk di lingkungan instansi.

Hasil wawancara dengan Ibu GT Nadya Noor Safitri SE, Ak, MM selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, menyatakan bahwa:

“Pemindahtanganan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dilakukan terhadap barang-barang yang sudah rusak berat atau tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional. Proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pengelolaan barang tetap tertib dan terdata dengan baik. Barang yang sudah tidak digunakan dapat dilakukan pemindahtanganan melalui proses lelang maupun hibah sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku”.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan pemindahtanganan, terlebih dahulu dilakukan pendataan dan pengecekan terhadap kondisi barang. Barang yang dinilai sudah tidak layak digunakan akan diusulkan untuk dipindahtangankan sesuai dengan prosedur yang ada. Beberapa barang dilakukan pemindahtanganan melalui pelelangan atau hibah kepada pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti proses administrasi yang memerlukan waktu dan adanya barang yang masih menunggu tindak lanjut pemindahtanganan.

Dari data wawancara dapat disimpulkan bahwa pemindahtanganan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah dilakukan sesuai prosedur terhadap barang yang sudah tidak digunakan atau mengalami kerusakan. Pemindahtanganan dilakukan melalui proses lelang maupun hibah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala administratif sehingga proses pemindahtanganan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pemindah-tanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada indikator perencanaan kebutuhan dan penganggaran, proses perencanaan dilakukan melalui pengajuan kebutuhan dari masing-masing bidang dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan anggaran sehingga tidak seluruh kebutuhan dapat direalisasikan secara optimal.

Pada indikator pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan berdasarkan kebutuhan kerja dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana dan proses pengadaan yang memerlukan waktu.

Pada indikator pemanfaatan, sarana dan prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai. Namun, pemanfaatannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas dan adanya sarana yang memerlukan perbaikan.

Pada indikator pengamanan dan pemeliharaan, kegiatan pengamanan dan pemeliharaan telah dilakukan melalui pendataan, pengawasan, pengecekan, dan perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan ringan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang memerlukan pemeliharaan lebih lanjut.

Pada indikator pemindahtanganan, barang yang sudah rusak berat atau tidak lagi digunakan telah dilakukan proses pendataan dan pengusulan untuk dipindahtangankan melalui lelang maupun hibah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala administratif sehingga proses pemindahtanganan memerlukan waktu yang cukup lama.

Secara umum, pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal sehingga perlu dilakukan peningkatan pada aspek pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pengelolaan administrasi agar pengelolaan sarana dan prasarana dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

Buku & Jurnal

Aziz, dkk. (2022). Pengelolaan sarana dan prasarana. Prenadamedia Group.

Bafadal, I. (2014). Manajemen perlengkapan sekolah: Teori dan aplikasinya. Bumi Aksara.

Gesi, B., dkk. (2019). Manajemen dan eksekutif. Jurnal Manajemen, 3(2).

Gie, T. L. (2000). Administrasi perkantoran modern. Liberty.

Gulo, W. (2002). Metodologi penelitian. Grasindo.

Jannah, M. (2018). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ar-Ruzz Media.

Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. (2012). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Bumi Aksara.

Nurmadiyah. (2018). Konsep pemanfaatan sarana dan prasarana. Jurnal Pendidikan.

Siagian, S. P. (2001). Filsafat administrasi. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Sukoco, B. M. (2010). Manajemen administrasi perkantoran modern. Erlangga.

Sutha, D. W. (2018). Administrasi perkantoran. Indomedia Pustaka.

Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip manajemen. Bumi Aksara.

Uzmasyah, & Nasution. (2022). Pengelolaan sarana dan prasarana. Jurnal Administrasi dan Manajemen.

Waharsono. (2010). Manajemen sarana dan prasarana. Rineka Cipta.

Peraturan & Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan